

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Avianto, Bhakti Nur. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT Bumi Perkasa, 2001
- Rahayu, Amy Y. S. Juwono, Vishu. Rahmayanti, Krisna Puji. *Pelayanan Publik Dan E-Governance: Sebuah Teori Dan Konsep*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020
- Efend, Jonaedi, Jhonny Ibrahim, and Prasetijo Rijadi. "Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris". (2016): 304
- Jonaedi Efendi, S. H. I., S. H. Johnny Ibrahim, and M. M. Se. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
- Ridwan, H. R. "Hukum Administrasi Negara". (2006)

B. Skripsi

- Asrul,"*Analisis Pegawai Pada Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Enkareng*".Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar,2018
- Agun Zulfaria,"*Analisis Penerapan Standar Masyarakat Miskin Di BPS Kota Pekanbaru*".Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Khasim,2012
- Fitriani Asman,"*Pengaruh Pertumbuhan Penduduk dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar*". Universitas Muhammadiyah Makassar,2020
- Rusnawati Wahid,"*Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukannya di Kota Makassar*". Universitas Bosowa 45.Makassar
- Sridayanti,"*Pelaksanaan Sensus Penduduk Secara Online Di Kota Makassar*".Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar,2021
- Wulandari, M. Athif Ar Rohman, Mohamad Djasuli, PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TRANPARANSI TERHADAP KINERJA SURVEYOR REGISTRASI SOSIAL EKONOMI DALAM MEWUJUDKAN DATA AKURAT, NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Trunojoyo Madura.jo Kabupaten Mojoker**
- Muhaimin,H., Angel, A., N. A., Annas, L., & Ramadani, R. S. to Dalam Pencatatan Pertumbuhan Masyarakat Desa Sidorejo Kabupaten Mojokerto Dalam

Pencatatan Badan Pusat Statistik. *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, 3(3), 159-164

Afrida, M. (2022). Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Aceh Dalam Pendekatan Collaborative Governance Oleh Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 7(4).

C. Peraturan perundang undangan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota

dalam Keputusan Presiden (Keppres) No 88/2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan

Permendagri No 18/2005 tentang Administrasi Kependudukan,

SK Menteri Perekonomian tanggal 24 Desember 1953 Nomor IB.099/M